

ECONOMIC GROWTH AND EQUITY ECONOMIC SYARIAH PERSPECTIVE

ECONOMIC GROWTH AND EQUITY PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Istianah

Sekolah Tinggi Islam Al Falah Pamekasan

Jl. Sumber Gayam Kadur Pamekasan

istianah.ghafur97@gmail.com, 085281811997

Abstract:

Economical concepts and policies based on capitalism and socialism have proven to have failed to create a just economy. This is caused adhering to capitalist and socialist ideologies, macroeconomic imbalances and national instability occur. So far, the capitalist and socialist economic system is clearly incompatible with the Islamic value system. Both are more exploitative and unfair in treating humans not as humans. Both systems are also unable to respond to the economic, political, social and moral challenges of today's era. This is not only because there are ideological differences, moral attitudes and socio-political frameworks, but also for reasons that are more worldly economic in nature, resource differences, changing international economic situations, respective economic levels and high socio-economic costs of development. (*high cost economist*). Therefore, it is urgent to review how the concept of economic growth and equity according to Islam can be a solution for the creation of community economic justice. This research methodology uses a *qualitative approach* with an interpretation pattern of developing ideas through data collection techniques from participant observation, interviews, and directed discussions. So, it can be help maximally of the economic problems development in Indonesia.

Keywords: Growth, Economic Equity

Abstrak:

Konsep dan kebijakan ekonomi ditinjau berdasarkan kapitalisme dan sosialisme, terbukti telah gagal mewujudkan perekonomian yang berkeadilan. Hal ini disebabkan berpegang faham kapitalis dan sosialis, maka terjadi ketidakseimbangan makro ekonomi dan instabilitas nasional. Sistem kapitalis dan sosialis ekonomi selama ini jelas tidak sesuai dengan sistem nilai Islam. Keduanya lebih bersifat eksploitatif dan tidak adil serta dalam memperlakukan manusia tidak semestinya. Kedua sistem itu juga tidak mampu menjawab tantangan ekonomi, politik, sosial dan moral di zaman sekarang. Hal ini bukan saja dikarenakan ada perbedaan ideologis, sikap moral dan kerangka sosial politik, tetapi juga karena

alasan-alasan yang lebih bersifat ekonomis duniawi, perbedaan sumberdaya, situasi ekonomi internasional yang berubah, tingkat ekonomi masing-masing dan biaya sosial ekonomi pembangunan yang tinggi (*high cost econom*). Oleh sebab itu, dirasa *urgent* untuk kembali m bagaimana konsep pertumbuhan dan pemerataan ekonomi menurut Islam yang dapat menjadi solusi bagi terciptanya keadilan ekonomi masyarakat. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan *qualitative research* dengan pola interpretasi mengembangkan ide melalui teknik pengumpulan data observasi partisipan, wawancara, diskusi secara terarah. Sehingga dapat membantu secara maksimal problematika pengembangan perekonomian di Indonesia.

Kata Kunci: Pertumbuhan, Pemerataan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Dalam Ekonomi Pembangunan, kajian mengenai pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menempati posisi yang cukup penting di kalangan para ekonom. Kajian ini setidaknya dimulai ketika ekonom mengamati fenomena-fenomena penting yang dialami dunia dalam dua abad belakangan ini. Perkembangan perekonomian dunia selama dua abad ini telah menimbulkan dua efek yang sangat penting, yaitu: *pertama*, kemakmuran atau taraf hidup yang semakin meningkat yang dicapai oleh masyarakat dunia, *kedua*, terciptanya kesempatan kerja baru kepada penduduk yang semakin bertambah jumlahnya (AMAL: *Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)*, n.d.).

Karena itu, maka tugas yang dihadapi negara berkembang sangat rumit. Mereka tidak hanya harus mengembangkan ekonomi dengan cara yang tepat dengan tingkat efisien dan keadilan yang tinggi dalam penggunaan sumberdaya, tetapi juga harus mengubah ketidakmerataan pembangunan yang ditimbulkan oleh resep yang salah itu menjadi merata.

Walau demikian, harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi yang telah berlangsung beberapa waktu lalu dan sampai saat ini berlangsung, juga banyak memberikan kontribusi dalam menciptakan keajaiban-keajaiban ekonomi. Kekuatan pertumbuhan ekonomi untuk mentransformasi masyarakat dari kemiskinan menuju kemakmuran menjadi suatu alasan.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah Indonesia terus berupaya melaksanakan program pembangunan dan Nawa Cita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

rakyat, keadilan sosial, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia. Tingkat inflasi mencapai 3,02%, menurun dibandingkan tingkat inflasi di 2015 sebesar 3,35%. Angka inflasi ini merupakan inflasi tahunan terendah sejak 2010. Tingkat pengangguran mencapai 5,6%, menurun dibandingkan 2015 sebesar 6,2%. Tingkat kemiskinan mencapai 10,7%, menurun dibandingkan 2015 sebesar 11,2% (*77999-ID-Ekonomi-Syariah-Dalam-Etika-Pemerataan-r.Pdf*, n.d.).

Dalam mengelola perekonomian dihadapkan pada situasi global yang dinamis dan aspirasi masyarakat yang terus meningkat, pemerintah menggunakan seluruh instrumen kebijakan agar kinerja perekonomian terus membaik dan fundamental ekonomi nasional dapat diperkuat. Kebijakan fiskal melalui APBN merupakan instrumen pengelolaan ekonomi yang sangat penting melalui fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi ekonomi.

Paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan Pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kinerja ekonomi dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta memerangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan. Sementara laporan Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Sejak bulan September 2017 angka kemiskinan mencapai 10,12 persen atau sekitar 26,58 juta orang (*1627870706-Buku-Ekonomi-Pembangunan-Islam.Pdf*, n.d.). Angka ini berkurang sebesar 1,19 juta orang bila dibandingkan pada bulan Maret 2017, sebesar 27,77 juta orang atau 10,64 persen. Angka ini menurut dalam 10 tahun terakhir. Penurunan ini disebabkan adanya inflasi 2017 yang tetap terjaga, meningkatnya upah riil buruh tani dalam 6 bulan terakhir, serta integrasi program-program kemiskinan.

Perekonomian Indonesia tahun 2017 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp13.588,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp51,89 juta atau US\$3.876,8. Ekonomi Indonesia tahun 2017 tumbuh 5,07 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2016 sebesar 5,03 persen dan tahun 2015 adalah 4,88 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,81

persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,09 persen, (Badan Pusat Statistik 2018).

Disisi lain, *rasio gini* Indonesia sebagaimana dikeluarkan Badan Pusat Statistik juga menunjukkan perbandingan yang cukup lebar antara si kaya dan si miskin. Rasio gini per Maret 2016 adalah 0.397. Angka ini jauh dari angka 1, namun rasio gini tersebut cukup memberikan isyarat bahwa ada kesenjangan. Ketimpangan ekonomi Indonesia merupakan yang ke-empat di dunia, dimana 49,3 persen ekonomi nasional dikuasi oleh satu persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Fakta lain tentang kesenjangan atau ketidakmerataan pembangunan ekonomi di Indonesia ditunjukkan dengan struktur perekonomian yang tak seimbang antara pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia, (Badan Pusat Statistik 2018).

Dalam ilmu ekonomi, kondisi ini bertolak belakang dengan asumsi-asumsi *ceteris paribus*. Dalam konteks ini, menurut Keynes, “Kita terkungkung dan kehabisan energi dalam perangkap teori dan implementasi ilmu ekonomi kapitalis yang ternyata tetap saja mandul untuk melakukan terobosan mendasar guna mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup umat manusia di muka bumi ini”.

Kesimpulannya, konsep dan kebijakan ekonomi yang berdasarkan kapitalisme dan sosialisme, terbukti telah gagal mewujudkan perekonomian yang berkeadilan. Akibat berpegang paham kapitalis dan sosialis, maka terjadi ketidakseimbangan makroekonomi dan instabilitas nasional. Sistem kapitalis dan sosialis ekonomi selama ini jelas tidak sesuai dengan sistem nilai Islam. Keduanya lebih bersifat eksploitatif dan tidak adil serta memperlakukan manusia bukan sebagai manusia. Kedua sistem itu juga tidak mampu menjawab tantangan ekonomi, politik, sosial dan moral di zaman sekarang. Hal ini bukan saja dikarenakan ada perbedaan ideologis, sikap moral dan kerangka sosial politik, tetapi juga karena alasan-alasan yang lebih bersifat ekonomis duniawi, perbedaan sumberdaya, situasi ekonomi internasional yang berubah, tingkat ekonomi masing-masing dan biaya sosial ekonomi pembangunan yang tinggi (*high cost econom*).

Ilmu Ekonomi Pembangunan sekarang ini menghadapi masa krisis dan re-evaluasi. Ia menghadapi serangan dari berbagai penjuru. Banyak ekonom dan perencana pembangunan yang skeptis tentang pendekatan utuh ilmu ekonomi pembangunan kontemporer. Menurut Kursyid Ahmad, sebagian mereka berpendapat bahwa teori yang didapat dari pengalaman pembangunan Barat kemudian diterapkan di negara-negara berkembang, jelas tidak sesuai dan merusak masa depan pembangunan itu sendiri.

Produksi harus diprioritaskan dari konsumsi, pengeluaran defisit dan hutang nasional yang terlalu besar merupakan hal yang membahayakan bagi masyarakat. Kebijakan yang memacu konsumsi ketimbang tabungan dan menggalakkan hutang merupakan hal yang bisa merusak pertumbuhan ekonomi dan standar hidup masyarakat.

Perencanaan pembangunan ekonomi secara terpusat (*Centrak Planning*) dan totalitarianisme terbukti tidak bisa berfungsi. Diperlukan suatu sistem finansial baru untuk menciptakan kerangka kerja finansial yang tangguh dalam meminimalisir inflasi dan ketidakpastian. Harus ada kebijakan jangka panjang yang berkaitan dengan kesejahteraan dengan memberikan kebebasan terjadinya pergerakan modal (*capital movement*) uang dan orang dari satu tempat ke tempat lain (Umar Capra, 2001).

Kondisi ini mengharuskan pembangunan ekonomi harus dilihat dalam konteks pemerataan kesejahteraan penduduk. Pemerataan pendapatan ataupun kesejahteraan itulah yang selama ini masih belum bisa dicapai oleh pemerintahan di beberapa negara yang penduduknya menganut mayoritas beragama Islam termasuk Indonesia. Kita juga bisa melihat jurang yang lebar antara masyarakat di wilayah Barat dan wilayah Timur. Sampai kemudian pemerintah Indonesia saat ini, tengah berusaha membangun wilayah Timur dari ketertinggalan pembangunan. Pemerataan pembangunan memang perlu terus dilakukan untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan sejahtera.

Analisis Kuznets mengenai hubungan pertumbuhan dengan ketidakmerataan ikut mendukung kondisi di atas. Menurut Kuznets dalam masa pertumbuhan akan terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor primer yang

produktivitasnya rendah ke sektor industri dan jasa dengan produktivitasnya tinggi. Perbedaan tingkat produktivitas dari kedua sektor ini menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan yang terjadi pada awalnya melebar, kemudian pada masa pertumbuhan akan kembali menyempit.

Kondisi pertumbuhan dan pemerataan yang tidak seimbang juga mendapat perhatian para ekonom Islam, seperti Abu Yusuf (731-798), Ibnu Rush (1126-1298), Ibnu Khaldun (1332-1404) sampai ke Imam Ghazali (1058-1111). Demikian juga kaum merkantilis, kaum klasik sampai ke Adam Smith (1737-1790), Marx (1818-1883). Sebutan atau istilah pertumbuhan, perkembangan dan pembangunan ekonomi sering digunakan secara bergantian, tetapi mempunyai maksud yang sama, terutama pembicaraan mengenai masalah ekonomi. Mayoritas penulis muslim yakin bahwa nilai-nilai Islam yang ditanamkan kepada generasi muslim melalui pendidikan memiliki peran dominan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Orang pertama yang mengisyaratkan hal ini secara ilmiah dan sistematis adalah Malik bin Nabi dalam karyanya "*al-Muslim fi 'Alam al-Iqtisodi*" (Malik bin Nabi, 1974). Dalam karyanya menekankan peranan manusia dalam masyarakat muslim sebagai batu fondasi pertama bagi proses pembangunan ekonomi. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat sejumlah penulis kontemporer.

Islam melihat pembangunan ekonomi tidak sebatas membangun faktor-faktor produksi, tapi dalam pengertian yang luas, menyeluruh dan substantif dengan menekankan pembangunan insan atau manusia seutuhnya (*human development*). Puncaknya adalah kehidupan yang seindah-indahnya (*fi ahsani taqwiim*). Ada nilai menuju keadaan yang sesuai dengan hakikat atau jati diri fitrah manusia. Pembangunan dalam Islam adalah menempati peringkat jiwa (ruhani) yang oleh para sarjana muslim disebut sebagai *tazkiyat an nafs* (M. Umer Chapra, dkk. 1997). Dari paparan pendahuluan tersebut, yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep pertumbuhan dan pemerataan ekonomi menurut Islam yang dapat menjadi solusi bagi terciptanya keadilan ekonomi masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan *qualitative research* dengan pola interpretasi mengembangkan ide melalui teknik pengumpulan data observasi partisipan, wawancara, diskusi secara terarah. Sehingga dapat membantu secara maksimal problematika pengembangan perekonomian di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Esensi Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi modern adalah perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat yang selanjutnya diiringi dengan peningkatan kemakmuran masyarakat (Suminto et al., 2021). Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara seperti penambahan jumlah dan produksi barang industri, infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan beberapa perkembangan lainnya.

Kondisi ini membuat para ekonom bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha perombakan sektor pertanian yang tradisional, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Dalam kajian ekonomi, kedua istilah di atas terkadang digunakan dalam konteks yang hampir sama. Banyak orang mencampuradukkan penggunaan kedua istilah tersebut. Mencampuradukkan istilah ini walaupun tidak dapat dibenarkan, pada dasarnya tidak terlalu mempengaruhi kajian ekonomi, karena inti pembahasan pada akhirnya akan berhubungan erat dengan perkembangan perekonomian suatu negara. Baik perkembangan dari segi investasi, pengeluaran pemerintah, konsumsi maupun ekspor impor. Hal ini juga didasarkan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang selama ini dipakai secara teori melalui *Gross National Product* (GNP). GNP didefinisikan

sebagai jumlah nilai akhir dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam seluruh kegiatan ekonomi selama satu tahun. GNP ini mengukur aliran penghasilan negara (dari pertumbuhan ekonomi) selama kurun waktu tertentu. Berikut formulanya.

$$\text{GNP} = C + I + G (E - M) + Z$$

Di mana:

C = *Consumer Spending*

I = *Investement Spending*

G = *Output for Government*

(E-M) = *Net Export or Import*

Z = *Zakat*

Dalam ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi (Handayani, n.d.). Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan *a sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare* (pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam, n.d.). (Pertumbuhan terus-menerus dari faktor-faktor produksi secara benar akan mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia).

Berdasarkan pengertian tersebut, pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. Sedangkan istilah pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dalam Islam adalah *the process of allaviating poverty and provision of ease, comfort and decency in life* (Proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan) (Juliana et al., 2018).

Dalam pengertian ini, maka pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral.

Dalam pertumbuhan ekonomi ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri, diantaranya; Sumberdaya yang dapat dikelola (*investible resources*), Sumberdaya manusia (*human resources*), Wirausaha (*entrepreneurship*), Teknologi (*technology*) (Soleh, 2015).

Selain itu, Islam juga melihat bahwa faktor-faktor di atas juga sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi.

a. SDM yang dapat dikelola (*investible resources*)

Pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan sumberdaya yang dapat digunakan dalam memproduksi asset-asset fisik untuk menghasilkan pendapatan. Aspek fisik tersebut antara lain tanaman induksi, mesin, dsb. Pada sisi lain, peran modal juga sangat signifikan untuk diperhatikan. Dengan demikian, proses pertumbuhan ekonomi mencakup mobilisasi sumberdaya, merubah sumberdaya tersebut dalam bentuk asset produktif, serta dapat digunakan secara optimal dan efisien. Sedangkan sumber modal terbagi dua yaitu sumber domestik/internal serta sumber eksternal.

Negara-negara muslim harus mengembangkan kerjasama ekonomi dan sedapat mungkin menahan diri untuk tidak tergantung kepada sumber eksternal. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir beban hutang yang berbasis bunga dan menyelamatkan generasi akan datang dari ketergantungan dengan Barat (Ma'ruf, n.d.). Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan sumberdaya domestik seperti tabungan dan simpanan sukarela, pajak ataupun usaha lain berupa pemindahan sumber daya dari orang kaya kepada orang miskin.

b. SDM (*Human Resources*)

Faktor penentu lainnya yang sangat penting adalah sumberdaya manusia. Manusia yang paling aktif berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Peran mereka mencakup beberapa bidang, antara lain dalam hal eksploitasi sumberdaya yang ada, pengakumulasian modal, serta pembangunan institusi sosial ekonomi dan politik masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, maka perlu adanya efisiensi dalam tenaga kerja. Efisiensi tersebut membutuhkan kualitas

professional dan kualitas moral. Kedua kualitas ini harus dipenuhi dan tidak dapat berdiri sendiri. Kombinasi keduanya mutlak dipadukan dalam batas-batas yang rasional.

c. Wirausaha (*Entrepreneurship*)

Wirausaha merupakan kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi dan sangat determinan. Wirausaha dianggap memiliki fungsi dinamis yang sangat dibutuhkan dalam suatu pertumbuhan ekonomi. Nabi Muhammad Saw, dalam beberapa hadits menekankan pentingnya wirausaha. Dalam hadits riwayat Ahmad beliau bersabda, "Hendaklah kamu berdagang (berbisnis), karena di dalamnya terdapat 90 % pintu rezeki". Dalam hadits yang lain beliau bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah perdagangan (bisnis)".

Dengan demikian, semangat *entrepreneurship* dan kewiraswastaan harus ditumbuhkan dan dibangun dalam jiwa masyarakat. Muhammad Yunus telah menekankan pentingnya pembangunan jiwa wirausaha dalam pembangunan ekonomi di negara-negara muslim yang tergolong miskin. Dalam hal ini ia mengatakan, : "Upah buruh bukanlah satu jalan mulus bagi pengurangan kemiskinan, justru wirausahalah yang mempunyai potensi lebih besar dalam meningkatkan basis-basis asset individual daripada yang dimiliki oleh upah kerja".

Karena itu, tidak mengherankan apabila saat ini muncul kesadaran yang meluas bahwa strategi industrialisasi modern yang berskala besar pada dekade terdahulu secara umum telah gagal memecahkan masalah-masalah keterbelakangan global dan kemiskinan. Litte, Scietovsky dan Scott telah menyimpulkan bahwa industri-industri modern yang berkla besar biasanya kurang dapat menghasilkan keuntungan daripada industri-industri kecil, di samping itu industri besar lebih mahal dalam hal modal dan lebih sedikit menciptakan lapangan pekerjaan, (Muhammad Yunus, 1988). Karena itulah Usaha Mikro (Industri kecil) secara luas dipandang sebagai suatu cara yang efektif untuk meningkatkan kontribusi sektor swasta, baik untuk tujuan-tujuan pertumbuhan maupun pemerataan bagi

negara-negara berkembang. Banyak para sarjana meragukan kontribusi industri-industri besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan dibanding industri kecil dan usaha mikro (Tibor Scietovsky dan Maurice Scott 1970).

Karena itulah Hasan Al-Banna memberikan dan mengembangkan industri rumah tangga yang utama dalam pembahasan tentang reformasi ekonominya sesuai dengan jaran Islam. Hal itu beliau tekankan karena akan membantu penyediaan lapangan kerja produktif bagi semua anggota masyarakat miskin, dengan demikian akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Dari paparan di atas dapat ditegaskan bahwa peran wirausaha dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang tak terbantahkan. Kelangkaan wirausaha bahkan bisa menyebabkan kurangnya pertumbuhan ekonomi walaupun faktor-faktor lain banyak tersedia. Dalam hal ini pula Islam sangat mendorong pengembangan semangat wirausaha untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

d. Teknologi

Para ekonom menyatakan bahwa kemajuan teknologi merupakan sumber terpenting pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dianggap tidak mengikuti proses sejarah secara gradual, tidak terjadi terus-menerus dalam suatu keadaan yang tidak bisa ditentukan. Dinamika dan diskontinuitas tersebut berkaiatan erat dan ditentukan oleh inovasi-inovasi dalam bidang teknologi (research and development) yang menghasilkan perubahan teknologi Muhammad M.Akram Khan, 1996). Dalam Al-quran juga ada perintah untuk melakukan eksplorasi segala apa yang terdapat di bumi untuk kesejahteraan manusia . Eksplorasi ini jelas membutuhkan penelitian untuk menjadikan sumberdaya alam tersebut berguna dan bermanfaat bagi manusia.

2. *Economic Growth And Equity* Perspektif Ekonomi Syariah

Keseimbangan orientasi duniawiyah dan ukhrawiyah merupakan orientasi yang diidam-idamkan, khususnya dalam Islam. Berangkat dari

orientasi yang seimbang antara duniawiyah (materi) dan ukhrawiyah (kepuasan non-materi) itulah Islam memandang bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan satu sarana untuk menjamin tegaknya keadilan sosial secara kekal. Karena, menurut Islam, keadilan sosial adalah salah satu unsur penting dari dinamika sosial. Dalam konteks suatu perekonomian yang sedang tumbuh inilah kue pendapatan nasional dapat diperbesar demi kemungkinan masing-masing menerima secara adil dari pertumbuhan tersebut.

Islam tidak menyukai perbedaan kekayaan dalam masyarakat melebihi titik tertentu. Sebab, pada gilirannya ini akan menimbulkan kebencian dan permusuhan yang membawa pada suatu konflik keras diantara berbagai bagian masyarakat yang pada akhirnya menghancurkan fondasinya. Ketika ketidakmerataan ekonomi berubah menjadi kecenderungan yang tidak wajar dan orang-orang miskin menjadi budak yang tidak berdaya ditangan orang-orang kaya, maka itu tanda-tanda kehancuran bagi orang-orang itu.

Islam bagaimanapun juga tidak akan membolehkan situasi semacam itu terus berkembang. Karena itu, islam menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah ketidakmerataan ekonomi agar tidak melebihi batas-batas yang wajar dan alamiah. Kondisi semacam itu akan tercipta dalam masyarakat yang memberikan kesempatan yang sama pada semua orang dalam perjuangan hidup mereka, dan memungkinkan setiap individu untuk menggunakan kemampuan, kepandaian dan keterampilan dengan sebaik-baiknya dalam usaha memenangkan sebuah posisi di masyarakat.

Islam mengambil tindakan pencegahan untuk menjamin dan menjaga kondisi dan kebutuhan manusia agar terjadi distribusi kekayaan yang wajar. Tidak boleh ada pelanggaran, atau pemerkosaan hak-hak individu; tidak boleh ada orang yang diijinkan untuk mengumpulkan kekayaan melebihi batas-batas yang wajar, tidak juga seseorang dibiarkan untuk mati kelaparan, tetapi semuanya diberi imbalan sesuai kemampuan, tanggung jawab dan kebutuhan ekonominya.

Dengan kata lain, Islam tidak menganjurkan persamaan yang semu dalam pemilikan dan pencarian kekayaan. Hal itu semata-mata demi keadilan

seseorang dalam mendapatkan kekayaan, yang akhirnya dapat memberikan pendidikan dan latihan pada manusia selama mereka menggunakan kebutuhannya secara sah. Islam hanya menginginkan keadilan bagi semua orang dalam mencari kekayaan. Untuk tujuan itu, ia menyediakan pendidikan dan latihan bagi orang-orang dan menerapkan aturan-aturan hukum yang diperlukan. Inilah prinsip keadilan islam agar ketidakmerataan kekayaan yang berlebihan dapat dihapuskan secara permanen.

Suatu lingkungan sosial yang di dalamnya setiap orang menikmati hasil pertumbuhan jelas lebih unggul dibandingkan dengan lingkungan sosial lainnya yang berisi orang-orang yang sebagian menikmati sementara yang lain menjadi korban.¹ Dengan demikian, kebijaksanaan pertumbuhan dalam suatu perekonomian Islam harus ditujukan untuk menyeimbangkan distribusi pendapatan dari suatu pertumbuhan ekonomi untuk semua manusia tanpa memandang secara diskriminatif antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya.

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam harus memasukkan aspek aksiologis (nilai, moral) agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya diorientasikan kepada kesejahteraan materi saja melainkan memasukkan juga aspek ruhaniyah. Memasukkan aspek ruhaniyah ini dalam pandangan Islam tidak akan menimbulkan masalah-masalah matematis, karena sifatnya yang abstrak sebab, yang dioptimalisasikan, sekalipun ditinjau dari sudut pandang ilmu ekonomi neo-klasik, bukanlah arus konsumsi akan tetapi “nilai guna” yang berkaitan dengannya, yang ia sendiri adalah kualitas yang tidak berwujud.

Dalam ekonomi Islam pertumbuhan ekonomi yang dituju adalah pertumbuhan optimal, baik dari segi kesejahteraan materi maupun rohani, Islam tidak memperkenankan konsumsi modal dan pertumbuhan yang melampaui batas yang memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah bagi manusia. Jadi menurut Islam tingkat pertumbuhan yang rendah yang diiringi dengan distribusi pendapatan yang merata akan lebih baik dari pada tingkat pertumbuhan yang tinggi tapi tidak dibarengi dengan distribusi yang merata.

Namun demikian, yang lebih baik dari keduanya adalah pertumbuhan yang tinggi tanpa memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah dari manusia dan disertai dengan distribusi pendapatan yang merata.

Perhitungan perkapita merupakan perhitungan agregat yang belum tentu mencerminkan kondisi riil. Angka rata-rata itu diperoleh berdasarkan pembagian atas Produk Domestik Bruto oleh jumlah penduduk. Sehingga jumlah penduduk sebagai faktor pembagi makin besar, sudah tentu hasil angka perkapita yang diperoleh semakin kecil, demikian pula sebaliknya. Wilayah Jabodetabek misalnya, angka pendapatan perkapitanya pasti akan sangat besar, sebab pertumbuhan ekonomi lebih terkonsentrasi di wilayah itu. Tetapi bila seluruh penduduk yang mayoritas tinggal di desa disertakan sebagai faktor pembagi tadi, maka perkapita secara nasional menjadi berkurang.

Dapat disimpulkan bahwa PDB dan perkapita tidak dapat menggambarkan kondisi riil. Karena itu, PDB yang tinggi belum cukup menggambarkan perbaikan ekonomi rakyat secara adil. Hal ini karena masih banyak penduduk Indonesia tidak memiliki penghasilan tetap, dan malah dibawah garis kemiskinan, misalnya penduduk Indonesia di kawasan timur dan kawasan-kawasan lainnya sebagai contoh di kawasan pegunungan Cartenz, daerah operasi PT. Freeport Indonesia, kawasan yang tampak makmur, hanyalah Tembaga Pura. Di luar wilayah itu, banyak penduduk yang belum mendapat kesempatan memperoleh penghasilan tetap.

Namun dalam perhitungan PDB perkapita, mereka yang fuqara' dan masakin (miskin) ini dimasukkan kedalam faktor pembagi, sehingga seolah-olah mereka memperoleh penghasilan tetap mencapai Rp. 6,3 juta pertahun (sekitar Rp. 525.000) perbulan. Mereka seolah-oleh pula menikmati kue pembangunan. Padahal sejatinya, mereka hidup dibawah garis kemiskinan.

Kondisi ini sekaligus menjadikan gambaran yang jelas, betapa kesenjangan antara yang kaya dan miskin di negeri ini telah sedemikian hebatnya. Realita disparitas ekonomi ini tidak saja terjadi di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, tetapi juga negara-negara maju yang menjadi pendekar kapitalisme, seperti Amerika Serikat.

Berdasarkan kondisi ketimpangan internasional dan labilnya pasar, maka negara Islam, organisasi dan lembaga Islam lainnya turut serta secara aktif mencapai tujuan khusus ekonomi pembangunan yaitu *growth with equity*.

Meskipun Islam menekankan keadilan sosial ekonomi dalam pertumbuhan, hal ini tidak berarti bahwa Islam tidak mementingkan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi merupakan tuntutan obyektif dan harus dilakukan dengan cepat dan dalam proporsi yang besar. Tanpa pertumbuhan ekonomi, keadilan memang dapat dirasakan, tetapi masih sulit untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan, karena proporsi ekonomi yang dibagikan masih kurang cukup.

Bagaimana pun Islam tidak mendukung ketidakmerataan, juga tidak mengajarkan pemerataan kekayaan, tetapi ia mengakui adanya suatu tingkatan ekonomi yang alamiah dalam masyarakat tanpa mengkonsentrasikan pada beberapa tempat tertentu. Islam juga tidak akan menyetujui perbedaan kekayaan yang tidak adil diantara berbagai kalangan masyarakat atau peraturan-peraturan yang dibuat-buat untuk mengubah perbedaan alamiah dalam masyarakat. Pendidikan moral akan memberikan pertolongan dalam mempertahankan perbedaan kekayaan dalam batas-batas yang wajar, sedangkan aturan-aturan hukumnya akan membantu menyebarkan kekayaan keseluruh anggota masyarakat.

Untuk mewujudkan pemerataan, menurut M. Umer Chapra, setidaknya ada lima unsur utama yang harus dilakukan. *Pertama*, mengadakan pelatihan dan menyediakan lowongan kerja bagi pencari kerja, sehingga terwujud *full employment*. *Kedua*, memberikan sistem upah yang pantas bagi karyawan. *Ketiga*, mempersiapkan asuransi wajib untuk mengurangi pengangguran, kecelakaan kerja, tunjangan hari tua dan keuntungan-keuntungan lainnya. *Keempat*, memberikan bantuan kepada mereka yang cacat mental dan fisik, agar mereka hidup layak. *Kelima*, mengumpulkan dan mendayagunakan zakat, infaq, dan sedeqah, melalui undang-undang sebagaimana undang-undang pajak.

Dengan upaya-upaya itu, maka kekayaan tidak terpusat pada orang-orang tertentu. Al-Qur'an dengan tegas mengatakan, "kekayaan hendaknya tidak terus menerus beredar di kalangan orang-orang kaya saja". (QS. 59 : 7). Selanjutnya menurut Umer Chapra ada lima tindakan kebijakan pembangunan ekonomi (*economic development*) yang disertai dengan keadilan dan stabilitas, yaitu : Memberikan kenyamanan kepada faktor manusia, Mereduksi konsentrasi kekayaan, Melakukan restrukturisasi ekonomi, Melakukan restrukturisasi keuangan, dan Rencana kebijakan strategis (M. Umer Cahpra, 2000).

Manusia merupakan elemen pokok dari setiap program pembangunan. Mereka adalah tujuan sekaligus sebagai sasaran pembangunan. Apabila mereka tidak dipersiapkan secara tepat untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, tidak mungkin akan berhasil mengaktualisasikan tujuan-tujuan pokok Islam dalam pembangunan. Karena itu, tugas yang paling menantang di depan setiap negara muslim adalah memotivasi faktor manusia untuk melakukan aktivitas konstruktif bagi pembangunan yang berkeadilan. Setiap individu harus memberikan apa yang terbaik dengan bekerja keras dan efisien yang disertai integritas, kejujuran, disiplin dan siap berkorban untuk mengatasi hambatan dalam perjalanan pembangunan.

M. A. Mannan menilai bahwa konsep pembangunan dalam Islam memiliki keunggulan dibandingkan konsep modern tentang pembangunan. Keunggulan tersebut terletak pada motivasi pembangunan ekonomi dalam Islam, tidak hanya timbul dari masalah ekonomi manusia semata-mata tetapi juga dari tujuan ilahi yang tertera dalam Al-quran dan Hadits.²

Memang harus diakui bahwa pertumbuhan perkapita sangat tergantung kepada sumber daya alam. Namun sumber daya alam saja bukan syarat yang cukup untuk pembangunan ekonomi. Masih dibutuhkan satu syarat lain yang utama yaitu perilaku manusia. Perilaku ini memainkan peran yang sangat

penting dalam pembangunan ekonomi. Untuk itu harus ada upaya menempa perilaku manusia tersebut ke arah yang mendukung pembangunan.

Dari paparan pembahasan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa solusi sebagai rekomendasi dalam mengatasi ketidakmerataan ekonomi Indonesia sehingga tidak memunculkan kesenjangan dan ketidakadilan ekonomi, antara lain:(Karun et al., 2012)

1. Pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan ekonomi yang mendukung industry dalam negeri sehingga iklim investasi kembali kondusif sekaligus membuka lahan kerja baru bagi masyarakat.
2. Memacu pertumbuhan ekonomi diseluruh daerah untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.
3. Sejak orde baru, pembangunan ekonomi Indonesia lebih cenderung kepada masyarakat menengah ke atas. Kita sering fokus pada proyek-proyek besar sehingga makin lama kesenjangan dan ketidakadilan makin lebar, sehingga masyarakat kita di tatanan menengah kebawah seperti petani, nelayan, UMKM, buruh, selalu ketinggalan. Untuk itu sudah saatnya pemerintah berpihak pada masyarakat ekonomi lemah.
4. Pemerintah wajib memberikan bantuan modal murah, pelatihan, proteksi dan perlakuan yang lebih baik, *special treatment* supaya UMKM bisa tumbuh lebih cepat.
5. Penyerapan dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi indonesia.
6. Pemerintah harus memprioritaskan pengembangan UMKM melalui peningkatan akses pasar, modal, pelatihan, dan distribusi serta memberikan perlindungan khusus bagi UMKM guna memperkecil kesenjangan ekonomi masyarakat.
7. Indonesia dengan mayoritas penduduknya beraga islam, seharusnya menjadikan zakat sebagai instrument wajib dalam mengatasi kesenjangan dan kemiskinan. Pemerintah sudah saatnya mendayagunakan zakat, infaq, dan sadaqoh, melalui undang-undang sebagaimana undang-undang pajak.

8. Membangun lebih banyak kawasan-kawasan ekonomi khusus, terutama wilayah yang tingkat kemiskinan masih terbilang tinggi.
9. Menangani permasalahan korupsi secara tegas tanpa pandang bulu.
10. Keterbatasan infrastruktur sudah lama menjadi kendala utama bagi pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah-wilayah terisolasi, daerah terluar/perbatasan, penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
11. Sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi belumlah cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seharusnya diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan. Ia harus mencapai kondisi *full employmen* agar hasil pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya pada persoalan pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi bukan hanya aktivitas produksi material saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang terkait erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya diukur dari aspek ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia sekaligus.

Kajian tentang pertumbuhan (*growth*) ekonomi dan pemerataan dapat ditemukan dalam konsep ekonomi Islam. Konsep ini pada dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun implisit dalam Al-quran, sunnah maupun pemikiran-pemikiran ulama Islam terdahulu, namun kemunculan kembali konsep

ini, khususnya beberapa dasawarsa belakangan ini terutama berkaitan kondisi negara-negara muslim yang terkebelakang yang membutuhkan formula khusus dalam strategi dan perencanaan pembangunannya. Kekhasan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumberdaya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material saja, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Hasan Muhammad Sadeq, 1987. *Economic Growth in An Islamic Economy*, tulisan dalam *Development and Finance in Islam*, Malaysia: International Islamic University Press.
- Carl Lidholm dan Donald Mead, 1998. *Small Scale Enterprise : A Profile*, diproduksi kembali dari *Small Scale Industries in Developing Countries : Empirical Evidence and Policy Implication*, (Michigan State University Development Paper, dalam *Economic Impact*, 2.
- Ervin Laszlo, 1999. *Millenium Ketiga, Tantangan dan Visi* (terj.3Rd Millenium The Challenge and Vision, Jakarta, Dinastindo, Adiperkasa Internasional.
- Hasan Al-Banna, 1989. *Majmu'at at-Rasail*, Alexandria: Darud Dakwah.
- Ian Litte, Tibor Scietovsky dan Maurice Scott, 1970. *Industri and Trade in Some Developing Countries*, London, Oxford University Press.
- Malik bin Nabi, 1974. *al-Muslim fi 'Alam al-Iqtishod*, Beirut: Dar al-syuruq.
- M. Umer Chapra, dkk. 1997. *Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam* Surabaya: Risalah Gusti.
- M.Abdul Mannan, 1997. *Islamic Economiys, Theory and Practice*, terj. M.Nastangin, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta, Dana Bakti Waqaf.
- Muhammad Yunus, 1988. *The Poor as the Engine of Development*, dalam *Economic Impact*, 2.

Sadono Sukirno, 1999. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Edisi II, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Badan Pusat Statistik dll, 2017.

Al-Quran dan Terjemahan

Harian.analisadaily.com/mobile/opini/news/kesenjangan pendapatan per kapita Indonesia. Terbitan 18 september 2018.